



Prosiding

Seminar Nasional

**“Pemberdayaan Masyarakat Menuju
Kemandirian Desa”**

Bandarlampung, 12 November 2016

Penyelenggara:



Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung

PROSIDING

Seminar Nasional Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung dengan tema:

“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU KEMANDIRIAN DESA“

PEMBICARA:

1. Drs. Yudha Setiawan, M.M. (Kepala BPMPD Provinsi Lampung)
2. Drs. Edi Firnandi, M.Si. (Kepala BPMD Kabupaten Lampung Selatan)
3. Drs. Abdul Syani, M.IP. (Universitas Lampung)
4. Drs. Witoro (NGO)
5. Dewi Cahyani Puspitasari, S.Sos., M.A. (Universitas Gadjah Mada)
6. Dr. Anggraeni Primawati, M.Si. (Universitas Nasional)
7. Dr. Erna Rochana, M.Si. (Universitas Lampung)

REVIEWER:

1. Dr. Sindung Haryanto, M.Si
2. Drs. Abdul Syani, M.IP.
3. Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
4. Drs. I Gede Sidemen, M.Si
5. Dr. Benjamin, M.Si.

EDITOR:

1. Drs. Susetyo, M.Si.
2. Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim.
3. Damar Wibisono, S.Sos. M.A.

SAMBUTAN KETUA PANITIA

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat karuniannya kita dapat mengikuti seminar ini dalam keadaan sehat walafiat.

Seminar yang bertajuk “Pemberdayaan Masyarakat menuju kemandirian desa” ini diselenggarakan oleh Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Kami mengundang kurang lebih 100 orang untuk hadir dalam seminar ini yang mewakili dari berbagai unsur antara lain: politisi, akademisi, praktisi (Kepala Desa, pendamping desa), Dinas/instansi Pemerintah, LSM, Pers, mahasiswa dan juga alumni Jurusan Sosiologi Fisip Unila.

Seminar ini merupakan forum untuk berbagai pengalaman dan pengetahuan mengenai pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, kami secara khusus mengundang kolega kami (para akademisi) di seluruh nusantara untuk berpartisipasi dalam seminar ini baik sebagai peserta, nara sumber maupun pemakalah. Alhamdulillah niat baik kami mendapat sambutan luar biasa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan FISIP Universitas Lampung dan Bapak Drs. Yudha Setiawan, M.M. sebagai keynote speaker. Ucapan yang sama kami tujukan kepada Bapak/ibu nara sumber dan para peserta. Seminar ini terselenggara dengan baik, berkat kerja keras teman-teman panitia. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia.

Tak ada gading yang tak retak. Seminar ini dalam pelaksanaannya tentu terdapat kekurangannya, untuk itu atas nama panitia kami memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Terakhir, kami ucapkan selamat berseminar semoga sekecil apapun upaya kita dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara ini, amin.

Akhirul kalam Bitaufik wal hidayah, Assalamu’alaikum warohmatullohiwabarokatuh.

Bandarlampung, 12 November 2016

Dr. Sindung Haryanto, M.Si
Ketua Panitia

DAFTAR ISI

STRATEGI DAN PENDEKATAN NILAI KEARIFAN LOKAL LAMPUNG DALAM PEMELIHARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DESA Abdul Syani	1-12
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT INKLUSIF: MELALUI PERSPEKTIF MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA SEKITAR PERTAMBANGAN BATUBARA DI DESA MANDUIN KECAMATANMUARA HARUS KABUPATEN TABALONG PROPINSI KALIMANTAN SELATAN Anggraeni Primawati, Yoyok Hendarso	13-26
WIRUSAHA SOSIAL MUDA DESA: PERAN STRATEGIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Dewi Cahyani Puspitasari	27-37
PARTISIPASI KOMUNITAS LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUIPEMBERDAYAAN MASYARAKAT Susetyo, Benjamin	38-50
STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI PERAN WANITA DALAM PENGEMBANGAN UMKM BERBASIS DESA DI KOTA SUNGAI PENUH Yolla Ramadani	51-57
KENDALA DAN TANTANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA UJUNGJAYA MENUJU DESA MANDIRI Yanti Setianti, Iriana Bakti, Aat Ruchiat Nugraha	58-64
STRATEGI PERENCANAAN PARTISIPATIF KELOMPOK WANITA TANI USAHA PENGOLAHAN PRODUK PANGAN BERBASIS SINGKONG Henita Astuti, Joko Ari Wibowo	65-73
PENYULUHAN HAK AZASI ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PEKERJA ANAK KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DAN APARAT PEMERINTAH DESA TARAHAH KECAMATAN KETIBUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Yuni Ratnasari, Dwi Wahyu Handayani	74-83
TAHAP PRAKONFLIK DAN KONFRONTASI PADA KONFLIK ANTAR WARGA DESA AGOM DENGAN DESA BALINURAGA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN Benjamin	84-96

<p>PROSES DAN UPAYA MEMBANGUN PERDAMAIAN “MENCAPAI KESEPAKATAN UNTUK MEMBANGUN PERDAMAIAN SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK PEMENUHAN HAK BERIBADAH”</p> <p>Ikram</p>	97-101
<p>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TERTINGGAL MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH ALAM (STUDI KASUS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TANJUNG KARYA MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH ECENG GONDOK DI KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT)</p> <p>Ilham Gemiharto</p>	102-108
<p>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG WISATA UNTUK PROMOSI MUSEUM ADAT SAI BATIN SANGGI UNGGAK BANDAR NEGERI SEMOUNG BERBASISKAN TEKNOLOGI</p> <p>Bartoven vivit Nurdin, Damayanti, Dadang Karya Bakti, Suprihatin Ali...</p>	109-118
<p>EKONOMI KREATIF BUDIDAYA CACING TANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT BANYUAJUH, KAMAL, BANGKALAN</p> <p>Sugeng Purwoko, Abdur Rohman, Ahmad Mughni</p>	119-123
<p>TANAH UNTUK RAKYAT (SUATU PELAYANAN DIAKONI GEREJA MELALUI YABIMA INDONESIA DALAM BENTUK ADVOKASI ALIH FUNGSI TANAH MUKIM DAN GARAP UNTUK PEMBERDAYAAN PETANI)</p> <p>Ikram</p>	124-130

PARTISIPASI KOMUNITAS LOKAL DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Susetyo, Benjamin

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

Email: susetyo.1958@fisip.unila.ac.id, benjamin@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Salah satu gambaran yang diperoleh di dalam struktur masyarakat perdesaan tertinggal terdapat indikasi komunitas lokal belum terjangkau oleh pemerintah dalam menerima pembangunan, termasuk pengorganisasian masyarakat dalam proses revitalisasi pembangunan infrastruktur. Metode berdasarkan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan teknik purposive. Data dan informasi dikumpulkan dengan cara: a. Wawancara mendalam, b. Observasi, c. Studi dokumentasi. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif melalui proses: a. Reduksi data, b. Penyajian Data, c. Menarik Kesimpulan. Lokasi penelitian di dua desa, Desa Babakan Loa dan Desa Kubu Batu di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Kesimpulan partisipasi komunitas lokal dari kelima informan menyatakan bahwa dalam pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat atau lebih tepatnya peran aktif dalam pengambilan keputusan dengan jumlah kehadiran cukup tinggi pada saat pelaksanaan rebug desa. Di dalam pelaksanaan pengerjaan usulan pembangunan desa, warga sadar secara standar dan kualitas pekerjaan, sehingga dalam penghitungan pengerjaan lebih menggunakan tenaga warga masyarakat desa sendiri. Hal yang paling menonjol, partisipasi dan tanggungjawab masyarakat dalam pemeliharaan sarana, di mana warga masyarakat membentuk kelompok untuk pemanfaat dan pemelihara sarana yang sudah terbangun dengan swadaya masyarakat sendiri.

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, komunitas lokal, dan pemberdayaan masyarakat

Pendahuluan

Sehubungan dengan penguatan partisipasi komunitas lokal dalam pelaksanaan pembangunan desa, tentunya terlebih dahulu dimusyawarahkan melalui musyawarah desa atau rebug desa. Rebug desa sendiri merupakan wadah untuk membicarakan penyusunan rencana pembangunan atau tempat musyawarah perencanaan pembangunan. Lebih jauh, peranan rebug desa bagi masyarakat desa, diantaranya dapat berupa: a. menemukan masalah atau kebutuhan, b. sumber daya pembangunan, dan c. merumuskan alternatif tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah atau mewujudkan kebutuhan, yang selanjutnya juga merumuskan rencana pembangunan dengan rencana pembangunan jangka pendek (tahunan), dan memandang desanya pada masa yang akan datang di setiap tahapan pembangunan secara partisipatif.

Berkaitan dengan partisipasi komunitas lokal di dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat berupa perbaikan infrastruktur perdesaan melalui swadaya dan pemberdayaan masyarakat lokal yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya pembangunan wilayah perdesaan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan fokus pembangunan infrastruktur, di mana potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat perdesaan khususnya kawasan desa tertinggal dengan karakteristik masyarakat perlu pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat sebagai wadah bagi masyarakat perdesaan yang mandiri, berkelanjutan dalam menyuarkan aspirasi, kebutuhan dan mampu yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan umum di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan.

Penguatan kelembagaan masyarakat yang dimaksud dititikberatkan pada upaya penguatan peran sebagai motor penggerak dalam “melembagakan” dan “membudayakan” nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan (nilai-nilai dan prinsip-prinsip pemberdayaan manusia). Dengan melalui kelembagaan masyarakat diharapkan tidak ada lagi kelompok-kelompok dalam masyarakat yang terjebak pada lingkaran kemiskinan, dan juga diharapkan dapat tercipta lingkungan perdesaan dengan perumahan yang layak huni di dalam suatu permukiman. Kelembagaan masyarakat yang dibangun pun oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya dapat mengelola anggaran secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dana yang ada dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat melalui rembug desa, misalkan perbaikan prasarana dan sarana maupun perumahan dan permukiman.

Adapun lokasi yang diambil dalam penulisan ini, yaitu duadesa di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Lampung yang pernah menerima program PNPM Mandiri. Pendekatan pengamatan pada permasalahan desa tertinggal dan kemiskinan, fokus penulisan ini sebagai salah satu gambaran yang diperoleh, dimana dalam struktur masyarakat perdesaan tertinggal terdapat indikasi komunitas lokal belum terjangkau oleh pemerintah dalam menerima pembangunan, termasuk pengorganisasian masyarakat dalam proses revitalisasi pembangunan infrastruktur (perencanaan, musyawarah desa, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan).

Permasalahan yang dihadapi masyarakat perdesaan tertinggal dalam peningkatan ekonomi lokal adalah kondisi ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai. Hal tersebut terlihat dari sebagian besar penduduk di desa harus menempuh jarak sejauh 6-10 km ke pusat pemasaran (pusat kecamatan). Bahkan di desa lain warga desa harus menempuh jarak lebih dari 10 km dengan kondisi jalan yang memprihatinkan. Pelayanan air minum perpipaan perdesaan masih sangat rendah, atau masih ada yang mengambil langsung dari sumber air yang belum terlindungi. Sementara itu, para petani yang memiliki luas lahan dan sarana perairan belum memadai, sehingga meningkatkan produktivitas pertanian belum maksimal. Selain itu, penyerapan tenaga kerja perdesaan dengan potensi yang dimiliki sebagian besar berusia produktif dan berpendidikan rendah semakin sempit. Dengan melalui revitalisasi pembangunan infrastruktur perdesaan diharapkan dapat membuka lapangan kerja, dan kemudahan akses untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Adapun yang menjadi fokus penulisan lebih menekankan pada partisipasi komunitas lokal dalam pelaksanaan pembangunan desa melalui pemberdayaan masyarakat.

Metode

Untuk mengetahui partisipasi komunitas lokal dalam penulisan ini secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran atau penjelasan dari variabel yang dibicarakan. Menurut Miles dan Huberman (2007:20), bahwa analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu : 1). Pengumpulan Data, 2). Reduksi Data, 3). Penyajian Data, 4). Verifikasi Data. Dalam penulisan ini, secara implisit fokus yang dapat dipergunakan dalam mengukur variabel partisipatif masyarakat dengan keberpihakan kepada yang miskin (penerima manfaat), dengan melihat seberapa jauh orientasi proses pelaksanaan kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil ditujukan kepada penduduk miskin di lokasi tersebut. Selanjutnya sehubungan dengan pelaksanaan program tentang pemberdayaan masyarakat, di mana seluruh proses implementasi kegiatan dari Program RIS PNPM Mandiri yang terletak di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Adapun proses revitalisasi pembangunan desa dari 2 lokasi desa dalam pelaksanaan program RIS-PNPM mandiri (hanya 2 desa yang dipaparkan dalam penulisan ini) dengan melihat seberapa jauh proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui : 1. Tahap perencanaan meliputi, diantaranya:

a. Identifikasi Masalah / Penggaliaan gagasan Masyarakat, b. Prioritas Masalah, c. Verifikasi Usulan Masyarakat, d. Identifikasi Penerima Manfaat, 2. Tahap Pelaksanaan Program: a. Menyusun Kelompok kerja masyarakat, b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan, c. Pembentukan KPP, d. Penyusunan Laporan Kegiatan Masyarakat, 3. Operasi Pemakaian dan Pemeliharaan.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian desa tertinggal merupakan kawasan perdesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang atau tidak memadai (tertinggal), sehingga menghambat pertumbuhan atau perkembangan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi (kemiskinan) dan di bidang pendidikan (keterbelakangan). Adapun kriteria desa tertinggal dalam penulisan paper ini, yaitu : a. Kawasan permukiman (unit administratif desa), b. Prasarana dasar wilayah kurang atau tidak (seperti air bersih, listrik, irigasi), c. Sarana wilayah kurang atau tidak ada, d. Sarana ekonomi (seperti pasar, pertokoan, dan industri masyarakat), e. Sarana transportasi (seperti kondisi jalan yang masih belum memadai, tertutupnya akses transportasi), f. Perekonomian masyarakat rendah (miskin/prasejahtera), g. Tingkat pendidikan rendah (terbelakang atau kurang dari program wajib belajar 9 tahun), h. Produktivitas masyarakat rendah (pengangguran usia produktif), i. Pengelompokan masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang (adanya kelompok mayoritas dan minoritas).

Selanjutnya partisipasi masyarakat¹ sendiri merupakan keberpihakan kepada warga masyarakat perdesaan tertinggal yang miskin sebagai penerima manfaat, atau melihat orientasi proses pelaksanaan kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan dan hasil ditujukan bagi warga miskin. Partisipasi dalam membantu menyusun rencana pembangunan dan memfasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan. Partisipasi keterlibatan masyarakat dimaknai sebagai sebuah proses dimana para *stakeholder* saling mempengaruhi dan berbagi kontrol atas inisiatif pembangunan, keputusan, dan sumber daya yang mempengaruhi mereka (World Bank, 1996:3), sedangkan menurut Sj. Sumarto (2003:15), partisipasi warga merupakan proses ketika warga, baik sebagai individu, kelompok sosial dan organisasi mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat (Plumer dalam Suryawan (2004:27), diantaranya : a. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat. Hal mana membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap faktor-faktor dan bentuk dari partisipasi yang ada; b. Pekerjaan masyarakat. Umumnya orang dengan tingkat tertentu dapat meluangkan atau tidak meluangkan waktu untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar, bahwa ada pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi; c. Tingkat pendidikan dan buta huruf pun, sangat berpengaruh pada keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami, melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi; d. Jenis kelamin, sebagian masyarakat masih menganggap faktor tersebut dapat mempengaruhi keinginan maupun kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, karena beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi atau pandangan yang berbeda terhadap suatu pokok permasalahan; e.

¹Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan keikutsertaan warga dalam proses merencanakan pembangunan, memikul beban pembangunan (swadaya); melaksanakan pembangunan; menerima, memanfaatkan dan memelihara hasil dari pembangunan; menilai dan mengkritik proses pembangunan, menurut oleh Yuda Setiawan pada Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa 12 Nopember 2016.

Kepercayaan terhadap budaya tertentu masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi dan metodologi yang digunakan. Sehubungan dengan partisipasi, Cohen dan Uphoff dalam Siti Irine Astuti D (2009:39-40) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

Sehubungan dengan pelaksanaan proyek fisik yang dapat diintegrasikan dengan program-program pembangunan desa secara partisipatif dengan kebersamaan setiap kelompok masyarakat desa melalui :

- Memfasilitasi pertemuan-pertemuan musyawarah dusun dan desa,
- Memfasilitasi masyarakat untuk menggunakan berbagai metode perencanaan partisipatif dalam menggali gagasan berdasarkan potensi dan masalah di masyarakat dan desa dalam upaya meningkatkan kapasitas diri dan kesejahteraan,
- Mencatat dan menginventarisir gagasan masyarakat pada waktu penggalan gagasan, sebagai bahan untuk pembahasan di rembug desa, dan
- Melakukan survei dan mengumpulkan data pendukung usulan kegiatan masyarakat, termasuk kesediaan swadaya, perkiraan jumlah penerima manfaat, perkiraan besarnya biaya kegiatan.

Dalam proses pelaksanaan partisipasi masyarakat dilihat kecenderungan peran aktif di dalam mengikuti sebagian besar jalannya pengerjaan proyek pembangunan desa, keterlibatan masyarakat diantaranya seperti, ikut bersama-sama dalam pekerjaan memecahkan batu sebagai bahan material pembuatan onderlagh jalan. Sebagian besar tentang spesifikasi pekerjaan pembuatan onderlagh jalan secara teknis tidak memerlukan pekerjaan yang terlalu sulit, seperti yang diutarakan oleh informan I, bahwa “kami tidak kesulitan dalam pemasangan batu pasangan, bisa mengambil tenaga masyarakat sebanyak-banyaknya dan harus menyiapkan batu pasangannya. Warga desa tinggal menyusun sesuai dengan penempatan yang sudah diatur. Beda dengan pembuatan siring, talud ataupun jembatan yang memerlukan tenaga terlatih, dengan pengeluaran semakin banyak dan keikutsertaan masyarakat semakin sedikit”.

Demikian halnya yang terjadi di Desa Kubu Batu, seperti yang dijelaskan oleh informan IV, bahwa “keikutsertaan warga cukup baik, ibu-ibu selalu membantu menyiapkan makanan untuk para pekerja, dan cukup jarang terjadi hal-hal demikian untuk saat ini. Kami sangat mengharapkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan dapat menikmatinya guna meningkatkan kehidupan warga disini”. Selanjutnya dari beberapa informan menuturkan di dalam hasil musyawarah yang dicapai dijelaskan oleh informan V, bahwa “inti musyawarah - mendapatkan suatu keputusan bersama untuk melaksanakan kegiatan. Permasalahan kebutuhan masyarakat desa berbagai macam dan kesemuanya tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat. Maka masyarakat diharapkan dapat memutuskan kebutuhan yang mendesak, mengingat bantuan dana yang terbatas. Maka perlu rencana matang dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat miskin”.

Pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan pada masyarakat pedesaan masih relatif tinggi. Namun masih ada refleksi, di mana kepentingan gender terlupakan. Perempuan dalam implementasi kegiatan bukan semata-mata sebagai salah satu bagian dari syarat pelaksanaan. Namun perempuan pun memiliki peranan dalam semua pencapaian tersebut. Keterlibatan gender, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Keterlibatan perempuan hanya sekedar memenuhi jumlah minimal (kuantitas) di dalam indikator capaian kinerja lapangan.

Prinsip perencanaan secara partisipatif untuk melihat partisipasi masyarakat di dalam hal pelaksanaan pembangunan dengan melihat keikutsertaan di dalam rembug desa, lihat tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi kehadiran dalam rembug desa

No	Desa	Keikutsertaan Masyarakat desa							
		Rembug Ds I		Rembug Ds II		Rembug Ds III		Rembug Ds IV	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Babakan Loa	40	20	45	38	34	40	34	45
2.	Kubu Batu	34	45	48	35	46	41	34	45

Sumber: Data Lapangan, 2009

Proses pengambilan keputusan dapat dilihat dengan partisipasi melalui tahapan kegiatan rembug desa, bahwa “didalam pelaksanaan Rembug desa I, masyarakat diminta untuk mengambil keputusan dalam proses pemilihan keanggotaan OMS (Organisasi Masyarakat Setempat). Di dalam pelaksanaan Rembug desa II masyarakat diminta untuk mengambil keputusan prioritas pekerjaan yang akan dilaksanakan. Pada Rembug desa III, penetapan keanggotaan KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara) dan operasi pemeliharaan, selanjutnya terakhir Rembug desa IV serah terima fisik dengan masyarakat”. Kematangan di dalam pengambilan keputusan sangatlah tergantung pada proses terjadinya musyawarah, keputusan yang diambil rata-rata diambil dari berbagai alternatif usulan yang diajukan.

Partisipasi Masyarakat Desa Babakan Loa

Di dalam proses perencanaan di Desa Babakan Loa diawali dengan penggalian gagasan di setiap RW. dengan melalui media rembug desa untuk kelompok campuran dengan difasilitasi oleh FM pemberdayaan masyarakat, dan menggunakan pertemuan rembug desa untuk kelompok perempuan dengan difasilitasi oleh FD pemberdayaan. Pada proses tersebut, masyarakat memperoleh pengalaman mengenai tahapan perumusan usulan kegiatan. Kegiatan yang diusulkan seharusnya mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya permasalahan kemiskinan. Mendasarkan pada tahapan tersebut, usulan kegiatan tiap-tiap RW dan kelompok perempuan merupakan upaya pemecahan masalah mereka yang diperoleh dari penggalian gagasan secara partisipatif dan dilakukan bersama. Selanjutnya, usulan kegiatan tersebut dimusyawarahkan di tingkat desa melalui forum Rembug desa yang menghasilkan usulan kegiatan Desa Babakan Loa.

Namun, proses musyawarah melalui forum rembug desa, akhirnya gagal mencapai mufakat, karena masing-masing RW berusaha mempertahankan dan menganggap bahwa usulannya yang perlu diprioritaskan dan menyangkut kepentingan warga RW. Masyarakat menganggap dana PPK yang cukup besar akan mampu membiayai kebutuhan RW yang selama ini sulit untuk direalisasikan melalui swadaya. Selain itu, persaingan diantara 2 organisasi keagamaan juga turut mewarnai proses MD. Dengan demikian, keberadaan wakil RW dan organisasi keagamaan yang sangat menentukan proses pengambilan keputusan pada forum MD. Pada akhirnya, pemilihan usulan kegiatan PPK Desa ditentukan melalui voting. Perwakilan RW yang hadir dalam MD dipersilahkan memilih usulan kegiatan yang memenuhi kriteria mendesak dan perlu diprioritaskan.

Partisipasi Masyarakat Desa Kubu Batu

Awalnya, kebanyakan warga kurang tertarik terhadap kegiatan pembangunan di desanya, baik kegiatan di bidang prasarana/ sarana, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dalam kegiatan ekonomi, khususnya pinjaman bergulir, masih banyak warga berpendapat bantuan program merupakan hibah dan tidak perlu dikembalikan. Namun, setelah

dijelaskan dengan baik oleh fasilitator dan pelaku program, warga pun menyadari untuk memenuhi tanggung jawabnya, seperti yang dijelaskan informan III, bahwa “Seorang OMS(Organisasi Masyarakat Setempat) menceritakan bagaimana pada awalnya warga desa menuduhnya telah “memakan” uang dana bantuan,tetapi setelah memberikan penyadaran oleh kader desa berhasil mengembalikan pinjaman, lalu dana pengembalian itu benar-benar dipinjamkan kembali (digulirkan) kepada kelompok masyarakat lain yang juga membutuhkan, warga pun meyakini dan mendukungnya”.

Di samping itu, OMS juga mendorong warga untuk turut menjaga sarana air bersih dan listrik desa, serta mengajak warga membayar iuran pemakaian air dan listrik tepat waktu. Di beberapa lokasi, para OMS memang bercerita bagaimana sulitnya merubah pola pikir warga dan aparat desa. Kembali lagi, pendekatan personal “dari hati ke hati” sangat berperan di dalamnya. Seperti di desa Kubu Batu, berkat pendekatan OMS dan fasilitator program, kini warga mulai mengetahui kedudukannya dalam pembangunan. Warga kini mulai bertanya-tanya bila ada kegiatan yang dilakukan “sendiri” tanpa melibatkan mereka, baik sebagai pekerja maupun pesertamusyawarah, dimana “Awalnya warga mempertanyakan kapan dana akan dikucur. Kenapa mereka hanya diajak musyawarah dan musyawarah. Bahkan banyak warga yang menganggap fasilitator hanya mengumbar janji-janji. Namun kini, warga justru memprotes bila mereka tidak diajak musyawarah atau tidak dilibatkan dalam kegiatan yang akan dilakukan di desanya,” seperti yang diutarakan oleh Informan IV.

Pendekatan dan penjelasan melalui media sosialisasi untuk lebih menekankan pada tujuan yang dicapai di dalam program menjadikan tolak ukur keberhasilan di dalam pelaksanaan kebersamaan menjadi ciri yang mendekatkan tingkat kepercayaan bersama di tengah masyarakat sudah terbentuk.

Dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat² sebagai strategi pembangunan desa yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan merupakan suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat sebagai komunitas lokal. Kekuatan sosial yang tidak berimbang menyebabkan kegagalan pasar untuk mewujudkan harapan seperti yang diutarakan oleh Brown (1995). Maka dari itu, diperlukan intervensi yang tepat, agar kebijaksanaan pada tingkat makro mendukung upaya mengatasi kesenjangan dengan kegiatan yang bersifat mikro dan langsung ditujukan pada lapisan masyarakat terbawah dari wilayah desa tertinggal.

Strategi pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan, diantaranya: **Pertama**, terarah (*targetted*) dengan pemihakan langsung kepada masyarakat bawah, terencana dalam mengatasi masalah dan sesuai kebutuhan. **Kedua**, program yang terencana dengan mengikutsertakan dan dilaksanakan oleh masyarakat bawah yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat bawah dengan tujuan, supaya lebih efektif sesuai dengan kehendak, kemampuan dan kebutuhan, serta terjadi peningkatan keberdayaan (*empowering*) masyarakat melalui pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri di bidang ekonomi. **Ketiga**, dengan kerja bentukkelompok pada masyarakat miskin dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi lebih efektif dan efisien, di samping itu kemitraan usaha antarkelompok agar lebih maju terus-menerus dibina dan dipelihara.

Selanjutnya untuk kepentingan analisis, pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dengan pendekatan komprehensif rasional dengan diperlukan perencanaan berjangka, penerahan sumber daya yang tersedia dan pengembangan potensi yang ada secara

²Definisi konsep pemberdayaan masyarakat adalah merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa, disampaikan oleh Yuda Setiawan pada Seminar Nasional Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Desa 12 Nopember 2016.

rasional mencakup seluruh masyarakat. Dalam upaya tersebut dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik pemerintah desamaupun dunia usaha, lembaga-lembagasosial dan kemasyarakatan, tokoh-tokoh lokal dan individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk bekerja sama.

Disamping itu, dengan pendekatan advokasi menekankan keberadaan pendamping bagi setiap kelompok yang terbentuk dan membantu untuk membuka akses kepada pelaku-pelaku pembangunan, membantu pengorganisasian diri, menggalang dan memobilisasi sumber daya untuk memiliki kemampuan dalam posisi tawar (*bargaining position*). Pendekatan tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dan sistem nilai yang berbeda. Apalagi masyarakat majemuk, di mana kekuasaan tidak terdistribusi secara merata dan akses keberbagai sumber daya tidak sama, menurut Catanese and Snyder (1986).

Selanjutnya untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat telah berhasil, maka diperlukan pemantauan, penetapan sasaran, dan diukur untuk dapat dibandingkan. Pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi sasaran utamanya adalah kemandirian masyarakat. Pengukuran, antara lain dengan *indeks gini* jumlah orang yang hidup dibawah garis kemiskinan, jumlah desa miskin, peranan industri kecil, nilai tukar pertanian, upah minimum dan sebagainya. Pembangunan manusia berkualitas bukan hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek pendidikan dan kesehatan. Di bidang tersebut, ukuran dikembangkan antara lain dengan persentase penduduk yang buta aksara, angka partisipasi sekolah untuk SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, persentase penduduk yang kurang gizi, dan rata-rata umur harapan hidup. Adapun yang dikembangkan oleh Bappenas bersama BPS semacam angka indeks kesejahteraan rakyat yang menggabungkan indikator ekonomi, kesehatan, dan pendidikan ke dalam suatu angka indeks.

Indeks kesejahteraan juga telah dikembangkan oleh UNDP yang dikenal dengan Human Development Index (HDI). Individu mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi melalui pembangunan spiritual, sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat, dalam rangka membangun masyarakat berakhlak. Terkait dengan itu pembangunan budaya, untuk menciptakan, menjadi jati diri, sikap budaya kerja keras, disiplin, kreatif, ingin maju, menghargai prestasi dan siap bersaing. Dalam pembangunan budaya dikembangkan orientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemberdayaan teknologi, merupakan jawaban berjangkauan ke depan, berkesinambungan dalam membangun masyarakat mandiri dan sejahtera. Pemberdayaan masyarakat membangkitkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat.

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata "*power*" (kekuasaan atau keberdayaan). Maka dari itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan sosial bagi penduduk suatu komunitas lokal untuk mengorganisirkan diri, membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya. Dalam kenyataannya, proses tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau pekerja sosial. Masyarakat perdesaan yang miskin cenderung sebagai kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dalam diri maupun tekanan eksternal dari lingkungan. Maka dari itu, dalam penulisan paper ini menekankan tiga proses, diantaranya reorientasi menemukan visi baru, restrukturisasi menata ulang organisasi kemasyarakatan dan sumberdaya lokal yang belum berkembang karena keterbatasan dan ketidakjangkauan masyarakat.

Seperti dikemukakan di atas, mekanisme pemberdayaan masyarakat perlu melibatkan segenap potensi yang ada di dalam masyarakat. Beberapa aspek di antaranya

dapat dikemukakan: **Pertama**, peranan pemerintah amat penting. Birokrasi pemerintah agar dapat menyesuaikan dengan misi tersebut. Maka terdapat beberapa upaya agar dilakukan, diantaranya: a. Birokrasi pemerintah perlu memahami aspirasi rakyat dan peka terhadap masalah yang dihadapi oleh rakyat, b. Birokrasi pemerintah perlu membangun partisipasi rakyat. Maksudnya, memberikan sebanyak mungkin kepercayaan pada rakyat untuk memperbaiki diri sendiri. Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi oleh masyarakat sendiri, c. Birokrasi pemerintah perlu menyiapkan masyarakat dengan sebaik-baiknya, melalui pengetahuan dan cara bekerja, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat efektif. Ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial untuk memungkinkan rakyat membangun kemandirian masyarakat, d. Birokrasi pemerintah perlu membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan konsultasi perlu untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) masyarakat, agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat, e. Birokrasi pemerintah perlu membuka jalur informasi dan akses yang dibutuhkan oleh masyarakat, f. Birokrasi pemerintah perlu menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat lemah. Dengan demikian untuk dapat menjalankan misi tersebut, maka birokrasi pemerintah perlu, diantaranya: (1) ditingkatkan kewenangan sampai pada lapisan terendah, (2) ditingkatkan kualitas, agar benar-benar mampu memberikan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat. Terutama titik berat perlu diberikan kepada aparat pada tingkat yang langsung berhadapan dengan masyarakat, secara hirarkis seperti aparat desa, kecamatan, maupun fungsional seperti PPL, guru, dokter, dan dansa.

Kedua, organisasi-organisasi kemasyarakatan dari luar masyarakat setempat yang memiliki potensi seperti lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), di samping organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional dan lokal. LSM dapat berfungsi sebagai pelaksana program pemerintah (mewakili pemerintah), dapat menjadi pembantu (konsultan) pemerintah, tetapi dapat juga menjadi pembantu rakyat dalam program pemerintah. Sebaliknya LSM sesuai dengan namanya, dapat pula mengembangkan programnya sendiri. Dalam rangka tersebut, aparat setempat harus menjalin kerjasama erat dengan LSM, agar program LSM dapat bersinergi dengan program pemerintah, atau sekurang-kurangnya tidak terjadi kesimpangsiuran yang dapat mengakibatkan benturan yang akan merugikan rakyat. LSM diperlakukan sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Tentunya yang dimaksud LSM yang murni dan bukan kepanjangan tangan dari kepentingan politik yang hanya menggunakan rakyat sebagai alat politik.

Ketiga, lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat, atau sering disebut sebagai *local community organization*. Lembaga tersebut seperti LKMD, PKK atau Karang Taruna, atau yang benar-benar tumbuh dari masyarakat sendiri seperti kelompok arisan, kelompok sinoman, kelompok paketan dan sebagainya.

Dalam rangka revitalisasi pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan desa tertinggal sangat diperlukan pembangkitan kembali fungsi kelembagaan dalam masyarakat yang dikembangkan oleh masyarakat sendiri, sebagai bagian dari mekanisme, yaitu seperti halnya kelompok-kelompok masyarakat (pokmas) yang setiap kelompok bisa terdiri dari 10 sampai 30 kepala keluarga. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut bisa efektif dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Kalau secara sendiri-sendiri, mereka sulit untuk dapat mengatasi hambatan yang menyebabkan kemiskinan. Kalau secara bersama-sama, mereka dapat saling bahu-membahu memperkuat dan saling menutupi kelemahan. Dinamika peranan kelompok dan sinergi diharapkan dapat menghasilkan nilai dari upaya individual dalam kelompok.

Keempat, pendamping. Warga masyarakat pedesaan tertinggal yang miskin umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan diri. Oleh karena itu, diperlukan pendamping untuk membimbing mereka dalam upaya memperbaiki

kesejahteraan. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, ataupun dinamisator.

Lingkup pembinaan yang dilakukan oleh pendamping meliputi upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitas para anggota maupun pengurus setiap kelompok dan peningkatan kemampuan usaha. Maka, pendamping perlu mengenal dan mengadakan komunikasi yang intensif dengan setiap kelompok, sedangkan pendamping yang paling efektif berasal dari anggota masyarakat itu sendiri atau merupakan anggota masyarakat yang telah berhasil dan sejahtera dalam kehidupannya.

Selain itu, dapat pula perekrutan sarjana-sarjana sebagai pendamping purna waktu, dan beberapa sarjana yang sesuai dengan keahlian dibidangnya, dapat pula pendamping diambil dari petugas lapangan dari tingkat kecamatan dan desa, dapat pula melalui berbagai departemen dan lembaga kemasyarakatan, antara lain dari Departemen Dalam Negeri (Latihan Pembangunan Desa Terpadu atau LPDT), Departemen Pertanian (Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL dan Penyuluh Pertanian Spesialis atau PPS), Departemen Sosial (Petugas Sosial Kecamatan atau PSK dan Karang Taruna), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (Petugas Lapangan KB atau PLKB), Kantor Menteri Pemuda dan Olahraga (Pemuda Pelopor), Departemen Tenaga Kerja (Tenaga Kerja Mandiri Profesional atau TKST), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan atau SP3), para dokter, bidan desa, guru, serta para petugas lainnya yang ada di desa yang hidup di tengah-tengah masyarakat desa. Disamping itu, secara swadaya dan sukarela perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya, seperti LSM, dapat pula ikut serta sebagai pendamping. Untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, pendamping harus siap bekerja setiap waktu, menghadiri pertemuan kelompok, mengorganisasikan program latihan, dan membantu kelompok memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

Kelima, pemberdayaan masyarakat merupakan cerminan proses perencanaan pembangunan nasional, sebagai aliran dari bawah ke atas. Dewasa ini upaya tersebut telah dilakukan mulai dari tingkat desa dengan musyawarah pembangunan desa (LKMD), forum diskusi UDKP di tingkat kecamatan, sampai ke Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat II, Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat I, Rapat Konsultasi Regional Pembangunan, dan Rapat Konsultasi Nasional Pembangunan. Mulai dari Dati II, kelembagaan perencanaan sudah cukup kuat, karena telah ada Bappeda. Di tingkat kecamatan telah ada pula pejabat teknis seperti PPL, mantri statistik, juru penerang, dokter puskesmas, yang dapat membantu kegiatan perencanaan meskipun pada taraf sederhana, yang masih lemah dan harus diperkuat dalam proses perencanaan adalah kemampuan perencanaan pada tingkat desa. Upaya tersebut meliputi penyempurnaan kelembagaan desa, penguatan sumber daya manusia serta pengembangan budaya masyarakat desa yang tanggap pada perubahan atau dapat disebut modernisasi masyarakat desa.

Keenam, keikutsertaan masyarakat yang lebih mampu dalam dunia usaha dan swasta. Pemberdayaan masyarakat dapat lebih optimal jika terjadi keterkaitan dalam kemitraan usaha diantara yang telah mampu dengan yang masih tertinggal terutama melalui penyediaan modal usaha untuk pengembangan usaha penduduk miskin. Model seperti sedang dikembangkan melalui gerakan nasional tabungan keluarga sejahtera (Takesra) dan kredit usaha keluarga sejahtera (Kukesra). Dalam Takesra dan Kukesra, penduduk miskin yang termasuk dalam kategori keluarga prasejahtera dan sejahtera I mendapatkan bantuan suntikan tabungan dengan maksud untuk membiasakan menabung dan mengelola keuangan dengan baik. Bagi penduduk miskin yang telah mampu menabung dapat mengajukan bantuan modal berupa kredit Kukesra dengan menyampaikan rencana kegiatan produktif. Bantuan modal yang diberikan kepada penduduk miskin tersebut berasal dari masyarakat yang telah lebih mampu.

Upaya tersebut yang prakarsanya diambil oleh pemerintah dapat diperluas, dalam berbagai bentuk pola kemitraan langsung terutama antara usaha swasta dengan usaha ekonomi rakyat. Potensi dunia usaha dan masyarakat yang mampu untuk turut memberdayakan masyarakat cukup besar dan perlu dikembangkan, untuk memperkuat perekonomian nasional, juga akan mempertebal persatuan dan kesatuan bangsa, karena kuatnya solidaritas sosial perlu disadari seringkali nilai luhur dan kearifan lokal masih perlu digali.

Adapun hasil perbaikan infrastruktur yang dilaksanakan didapatkan tujuan pemberdayaan - memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya ditindas - struktur sosial - tidak adil). Adapun pengkategorian nya, sebagai berikut : 1. Kelompok lemah karena struktural, secara kelas, gender, maupun etnis, 2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, kaum wanita, dan anak-anak, 3. Kelompok yang lemah secara personal, termarginal karena kondisi ekonomi keluarga ataupun permasalahan keluarga.

Selanjutnya beberapa kelompok masyarakat yang selama ini kurang diikutsertakan selama program ini berlangsung mengalami diskriminasi, seperti halnya yang dituturkan oleh informan Damiri mengungkapkan ada sejumlah warga yang mungkin tidak ikut dalam musyawarah, sebagai syarat berlangsungnya Rembug desaseperti yang diungkapkan diatas bahwasanya masyarakat yang selama ini kurang bergaul ditengah masyarakat karena adanya kesenjangan diantara warga masyarakat ataupun kesibukan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan prespektif tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa kelompok lemah mengekspresikan aspirasi dan menunjukkan kemampuannya terhadap lingkungan sosialnya menjadi tertutup dan cenderung semakin melemah, menurut Sennet dan Cabb (1972) dan Conway (1979) menyatakan salah satu penyebab ketidakberdayaan disebabkan oleh beberapa faktor seperti : ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan jaminan sosial, kesehatan, ketiadaan pengalaman politik, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional (dalam Suharto, 2009). Secara teoritis sekelompok masyarakat ketidakberdayaan merupakan internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat, mereka lebih cenderung beranggapan memang dirinya lemah dan tidak berdaya.

Dalam pemikiran Leanner menjelaskan bahwa ada seperangkat pikiran emosional, intelektual dan spiritual yang mencegahnya dari pengaktualisasian diri kemungkinan-kemungkinan sederhana (takut mengambil resiko dengan pemikiran sederhana). Misalnya saja ada persepsi diantara warga masyarakat sehubungan bantuan program RIS-PNPM dengan dibangunnya MCK umum di depan rumah, ada yang tidak peduli karena lebih memilih pergi ke sungai dan ada pemikiran kesadaran keuntungan apa yang akan diperoleh, aktualisasi diri tidak dapat diperoleh dengan waktu yang singkat. Bimbingan dan pola pendampingan merupakan cara yang efektif untuk melakukan pendekatan secara mendalam.

Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Maka dari itu, ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, segenap upaya dicurahkan pada aspek-aspek yang menjadi perubahan, seperti di dalam pendekatan perbaikan pembangunan infrastruktur desa. Sasaran perubahan tersebut dapat dioptimalkan sebagai suatu awal untuk memulai dari kesadaran masyarakat. Hal mana sejalan dengan pendapat Parson (Suharto, 2009), di mana proses pemberdayaan dilakukan secara kolektif. Selanjutnya menurut beliau, bahwa tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi suatu relasi satu lawan satu antara fasilitator dan OMS. Meskipun pemberdayaan tersebut dapat meningkatkan rasa percaya diri warga masyarakat dan kemampuan diri dari OMS. Hal mana bukanlah merupakan strategi utama dari pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilaksanakan secara kolektivitas.

Pemberdayaan (sosialisasi program) masyarakat merupakan pendekatan pembangunan (berkelanjutan) dengan tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menjalankan proses pembangunan *dari, oleh dan untuk* masyarakat, bahkan dengandukung berbagai kalangan atau pemangku kepentingan lainnya. Pelaku utama pembangunan itu sendiri adalah warga masyarakat yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan, penyediaan pendampingan serta pendanaan stimulant, yang akan mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam menjalankan upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan dalam menjalankan upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia, lihat tabel 2.

Tabel 2. Indikator keberdayaan

Jenis hubungan kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses manfaat kesejahteraan	Kemampuan kultural dan politis
Kekuasaan di dalam : Meningkatkan kesadaran dan keinginan berubah	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi terhadap kontribusi ekonomi dirinya • Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara • Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepercayaan diri dan kebahagiaan • Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara • Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain • Keinginan untuk mengontrol jumlah anak 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Assertiveness</i> dan otonomi • Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya diskriminasi hukum dan pengucilan politik • Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum dan politik
Kekuasaan untuk : Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah; meningkatkan kesempatan kesempatan untuk memperoleh akses	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap pelayanan keuangan mikro • Akses terhadap pendapatan • Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga • Akses terhadap pasar • Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterampilan, termasuk kemelekan huruf • Status kesehatan dan gizi • Kesadaran mengenai akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi • Ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah • Pengetahuan mengenai proses hukum. Politik dan kebudayaan • Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintang akses terhadap proses hukum, dan politik
Kekuasaan atas : Perubahan pada hambatan-	Kontrol atas penggunaan pinjaman dan	Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai	Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi

hambatan sumber kekuasaan pada tingkat rumah tangga masyarakat dari makro kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut	tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif keluarga yang lainnya Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar	lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat.	budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya hukum dan politik
Kekuasaan dengan meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro	Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern Mampu memberi gaji terhadap orang lain Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro	Penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan politik	Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat kritis Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam masyarakat Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, politis, hukum pada tingkat masyarakat makro

Sumber : Data hasil penelitian 2009

Simpulan dan Saran

Partisipasi komunitas lokal dari kelima informan menyatakan bahwa dalam pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat atau lebih tepatnya peran aktif dalam pengambilan keputusan dengan jumlah kehadiran cukup tinggi pada saat pelaksanaan rembug desa. Di dalam pelaksanaan pengerjaan usulan pembangunan desa, warga sadar secara standar dan kualitas pekerjaan, sehingga dalam penghitungan pengerjaan lebih menggunakan tenaga warga masyarakat desa sendiri. Hal yang paling menonjol, partisipasi dan tanggung jawab masyarakat dalam pemeliharaan sarana, di mana warga masyarakat membentuk kelompok untuk pemanfaat dan pemelihara sarana yang sudah terbangun dengan swadaya masyarakat sendiri.

Daftar Pustaka

- Anonim. 1994. *Panduan Program Inpres Desa Tertinggal*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional - Departemen Dalam Negeri.
- 1995. *Pembinaan Program dan Pendampingan Pokmas IDT*; Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional - Departemen Dalam Negeri.
- 1995. *Kaji Tindak Program Inpres Desa Tertinggal Tahun Pertama*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Arndt, Heinz W. 1987. *Economic Development: The History of An Idea*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Baran, P.A. 1957. *The Political Economy of Growth*. New York: Monthly Review Press.
- Bauzon, Kenneth E (ed). 1992. *Development and Democratization in the Third World: Myths, Hopes and Realities*. Washington: Crane Russak.
- Becker, Gary S. 1964. *Human Capital: A Theoretical Approach and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. New York: Columbia University Press.
- Beebe, James. 1995. "Basic Concepts and Techniques of Rapid Appraisal". Human Organization, vol. 54, No. 1, Spring.
- Brautigam, Deborah. 1995. "Reducing Poverty: Lesson from Taiwan". Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.
- Brown, Donald. 1995. "Poverty-Growth Dichotomy". Uner Kirdar dan Leonard Silk (eds.), *People: From Impoverishment to Empowerment*. New York: New York University Press.
- Buchori, Mochtar. 1993. "Pengantar". Walter Fernandes dan Rajesh Tandon (eds.) *Riset Partisipatoris- Riset Pembebasan*. Penyunting: Wardaya dan Hardiman. Gramedia Pustaka Umum.
- Cariola, C. dan Sunkel O. *Un Siglo de Historia Economica de Chile, 1830-1930*. Madrid: Ediciones Cultura Hispanica, juga dalam R. Cortez Conde and S.J. Hunt (eds) *The Latin American*